



RLPPD

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



BUPATI PARIGI MOUTONG
H. ERWIN BURASE, S.Kom



WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG
H. ABDUL SAHID, S.Pd

→ Capaian Kinerja Makro

→ Hasil EPPD & Opini Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya

→ Inovasi Daerah

→ Ringkasan APBD

→ Inovasi Daerah



www.tapem@parigimoutongkab.co.id



94471 Parigi

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tepat pada waktunya.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) serta Laporan ini juga sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan kiranya dapat digunakan sebagai wadah penyampaian informasi publik tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai pendorong untuk terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai syarat mutlak akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 ini masih banyak terdapat kekurangan atau kekeliruan, tentunya kami mengharapkan masukan/saran dan kritikan yang konstruktif yang bersifat membangun dari semua pihak untuk dijadikan bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan ini mengacu pada sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

Semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 ini bermanfaat dan memberikan gambaran nyata pada masyarakat tentang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong a, akhir kata disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa membantu kami sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, seraya memohon kehadiran Allah SWT, kiranya meridhoi usaha kita bersama sebagai amal bhakti dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Parigi, 25 Maret 2026



Daftar Isi

1. Capaian Kinerja Makro	4
2. Ringkasan Capaian Urusan Pelayanan Dasar	7
2.1. Urusan Pendidikan	7
2.2. Urusan Kesehatan	14
2.3. Urusan Pekerjaan Umum	31
2.4. Urusan Perumahan Rakyat	35
2.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	37
A. Sub Urusan Trantibum dan Damkar	37
B. Sub Urusan Penanggulangan Bencana	42
2.6. Urusan Sosial	52
3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	
Tahun Sebelumnya	59
3.1. Hasil EPPD	59
3.2. Opini Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya	60
4. Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah	62
4.1. Realisasi Pendapaan Menurut Jenis Pendapatan	62
4.2. Realisasi Belanja Menurut Belanja	83
4.3. Pembiayaan Daerah	94
5. Inovasi Daerah	97

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan gambaran umum kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin melalui indikator-indikator strategis pembangunan. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, baik dari aspek kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, maupun pemerataan hasil pembangunan. Evaluasi terhadap indikator makro menjadi penting sebagai dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 hingga Tahun 2025. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi capaian kinerja, mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan data capaian kinerja makro Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024–2025, secara umum menunjukkan tren yang positif dan kondusif. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta membaiknya kinerja perekonomian daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 69,48 pada tahun 2024 menjadi 69,99 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi program pembangunan manusia yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah, meskipun masih diperlukan upaya akseleratif untuk mencapai kategori yang lebih tinggi.

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 14,20 persen pada tahun 2024 menjadi 13,51 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Hal ini juga menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan telah mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan secara lebih tepat.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,10 persen pada tahun 2024 dan relatif stagnan pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun stabilitas pasar tenaga kerja dapat terjaga, namun penciptaan lapangan kerja baru belum optimal dalam menekan angka pengangguran secara signifikan. Oleh

karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih progresif dalam mendorong investasi daerah, pengembangan sektor unggulan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada aspek perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari 3,58 persen pada tahun 2024 menjadi 3,92 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat, yang didorong oleh kontribusi sektor-sektor unggulan daerah serta meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan struktur ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan dari Rp23,48 juta pada tahun 2024 menjadi Rp25,51 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat, yang mencerminkan perbaikan tingkat kesejahteraan ekonomi secara umum.

Di sisi lain, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio mengalami penurunan dari 0,25 pada tahun 2024 menjadi 0,24 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat semakin merata, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara lebih adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja makro Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024–2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berada pada jalur yang positif. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya diperlukan penguatan kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 1. 1
Capaian Kinerja Makro
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 – 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,48	69,99	0,73
2.	Penduduk Miskin	14,2	13,5	-4,86
3.	Pengangguran Terbuka	74,68	76,58	2,54
4.	Pertumbuhan Ekonomi	74,68	76,58	2,54
5.	PDRB Per Kapita Atas dasar Harga Berlaku (ADHB)	23.475,94	25.512,38	8,67
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,25	0,250	-

2. Ringkasan Capaian Urusan Pelayanan Dasar

2.1. Urusan Pendidikan

A. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	1.622	1.4066	86,70%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					93,53%	2025
1)	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	61,06	60,64	99,31%	2025
2)	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	54,17	47,53	91,58%	2025
2	Pendidikan Dasar	Orang	76596	68957	90,03%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					97,81%	2025
A	SD (2025)				98,53%	2025
1)	Kemampuan literasi	Nilai	50.61	50.85	98.53%	2025
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	47.28	47.15	100%	2025
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	71.34	70.43	99.73%	2025
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.13	68.12	98.72%	2025
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.66	55.15	98.54%	2025
B	SMP				97,09%	2025
1)	Kemampuan literasi	Nilai	50.61	50.85	98.53%	2025
2)	Kemampuan numerasi	Nilai	47.28	47.15	100%	2025
3)	Indeks iklim keamanan	Nilai	71.34	70.43	99.73%	2025
4)	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	69.13	68.12	98.72%	2025
5)	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.66	55.15	98.54%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	7.531	5.874	78,00%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					4,38%	2025
1)	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	100	21,87	21,88%	2025

B. Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I	Pendidikan Anak Usia Dini	876.652.100	570.607.400	65,09%
A	Program Pengelolaan Pendidikan			
a	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	25.000.000	24.990.000	99.96%
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.050.500	7.826.700	97.22%
3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	46.372.100	39.368.800	84.90
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	275.400.000	0	0.00%
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	260.276.400	239.917.000	92.18%
6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	44.603.900	44.432.600	99.62 %
7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	68.041.800	67.949.200	99.86%
8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	84.474.800	83.361.800	98.68%

NO	JENIS LAYANAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	64.432.600	62.761.300	97.41%
II	Pendidikan Dasar			
A	Program Pengelolaan Pendidikan			
a	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	353.694.291.846	283.584.163.843	80.18 %
1	Angka Partisipasi Sekolah			
1)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	242.964.000	237.281.181	97.66%
2)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	260.501.000.000	195.356.910.000	74.99%
3)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.905.111.200	2.899.986.778	99.82%
2	Literasi			
1)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	140,232,938	114,654,400	81.76%
2)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	892.500.000	0	0.00%
3)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	157.536.800	154.298.218	97.94%
4)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	79.561.494	34.432.500	43.28%
5)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	40.205.600	40.175.200	99.92%
6)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	17.131.380.000	16.560.294.100	96.67%
7)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	161.628.200	154.106.838	95.35%
3	Keamanan			

NO	JENIS LAYANAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	79.561.494	34.432.500	43.28%
2)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	17.131.380.000	16.560.294.100	96.67%
3)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	35.124.200	35.020.200	99.70%
4	Kebhinekaan			
1)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	79.561.494	34.432.500	43.28%
2)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	17.131.380.000	16.560.294.100	96.67%
3)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	35.124.200	35.020.200	99.70%
5	Inklusifitas			
1)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	79.561.494	34.432.500	43.28%
2)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	17.131.380.000	16.560.294.100	96.67%
3)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	35.124.200	35.020.200	99.70%
b	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	216.207.614.600	203.660.618.734	94.20%
1	Angka Partisipasi Sekolah			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.457.486.400	1.454.988.533	99.83%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	184.276.000.000	183.591.225.000	99.63%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	145.186.900	143.609.631	98.91%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.512.000.000	5.508.950.000	99.94%

NO	JENIS LAYANAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2	Literasi			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.621.420.000	1.602.520.000	98.83%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.320.000.000	0	0.00%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	124.598.400	122.380.913	98.22%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.779.200	43.578.000	85.82%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	155.592.400	139.679.300	89.77%
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	139.781.950	135.013.922	96.59%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	89.058.400	87.241.500	97.96%
3	Numerasi			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	1.621.420.000	1.602.520.000	98.83%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	43.200.000	0	0.00%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	124.598.400	122.380.913	98.22%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	15.559.240.000	8.180.130.000	52.57%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	139.781.950	135.013.922	96.59%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.779.200	43.578.000	85.82%

NO	JENIS LAYANAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	89.058.400	87.241.500	97.96%
4	Keamanan			
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.779.200	43.578.000	85.82%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	89.058.400	87.241.500	97.96%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89.373.400	89.369.700	100.00%
5	Kebhinekaan			
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.779.200	43.578.000	85.82%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	89.058.400	87.241.500	97.96%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89.373.400	89.369.700	100%
6	Inklusifitas			
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.779.200	43.578.000	85.82%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	89.058.400	87.241.500	97.96%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89.373.400	89.369.700	100%
III	Pendidikan Kesenjangan			
A	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan			
a	Angka Partisipasi Sekolah			

NO	JENIS LAYANAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.995.775.000	2.851.982.311	95.20%
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	87.938.400	65.398.700	74.37%
JUMLAH		573.862.271.946	490.732.770.988	85,51

C. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- 1) Belum maksimalnya penyerapan anggaran karena keterlambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang teknis sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.
- 2) Dalam Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2024, masih terdapat kendala , dimana bidang teknis belum sepenuhnya memahami tentang SPM tersebut.
- 3) Kesulitan dalam membuat laporan capaian SPM akibat data yang dibutuhkan tidak tersedia.
- 4) Adanya permasalahan lokasi tanah bangunan sehingga sekolah yang mendapatkan bantuan tidak dapat melaksanakan pembangunan.
- 5) Waktu penyelesaian pekerjaan DAK Fisik SD dan SMP tidak sesuai dengan MOU sehingga pelaksanaannya sampai lewat tahun perencanaan.

2. Solusi

- 1) Pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- 2) Perlunya mengikuti Pelatihan SPM untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi pegawai yang bersangkutan
- 3) Penertiban lokasi tanah bangunan sekolah agar memiliki sertifikat sebelum melaksanakan pembangunan

- 4) Mengupayakan pelaksanaan pembelanjaan dana BOS dengan tidak menganggarkan belanja modal pada tahap III.
- 5) Kebijakan Kemendikbudristek pada tahun 2024 bahwa dana BOS tersalurkan dalam dua tahap (tahap I dan Thap II).
- 6) DAK Fisik tiap Bidang akan dilaksanakan lebih awal setelah petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan telah diterima.
- 7) Melaporkan penggunaan dana BOS secara transparan dan akuntabel

2.2. Urusan Kesehatan

A. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	6.559	5.990	91,32%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					17,36%	2025
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/ Vial	686	656	95,63%	2025
2)	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1.234.260	1.234.260	100%	2025
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	6.857	6.857	100%	2025
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	6.857	5.990	87,36%	2025
5)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	6.857	5.990	87,36%	2025
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	1.029	1.026	100%	2025
7)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	6.857	5.990	87.36 %	2025
8)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6.857	5.990	87.36 %	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
9)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6.857	5.083	74.13 %	2025
10)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6.857	5.083	74.13 %	2025
11)	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	458	458	100%	2025
12)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	96	76	79,17%	2025
13)	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	920	776	84.35 %	2025
14)	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	991	787	79,41%	2025
15)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	165	126	76.36 %	2025
16)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	87	66	75.86 %	2025
17)	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	6.857	5.990	87,36%	2025
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	6.559	6.077	92,65%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					85,08%	2025
1)	Formulir partograf	Formulir	6.559	6.077	92.65%	2025
2)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6.559	6.077	92.65%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6.559	6.077	92.65%	2025
4)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6.559	6.077	92.65%	2025
5)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	96	76	79,17%	2025
6)	Tenaga kesehatan : Bidan(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	920	776	84,35%	2025
7)	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	991	787	79,41%	2025
8)	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	165	126	76.36%	2025
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	87	66	75.86%	2025
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	6.407	6.147	95,94%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					89,20%	2025
1)	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	6.407	5.820	90,84%	2025
2)	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	6.407	6.147	95,94%	2025
3)	Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	6.407	6.147	95,94%	2025
4)	Formulir bayi baru lahir	Formulir	6.407	6.147	95,94%	2025
5)	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	19.221	18.441	95,94%	2025
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6.407	6.147	95,94%	2025
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	6.407	6.147	95,94%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
8)	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	97	78	80.41 %	2025
9)	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	920	776	84.35 %	2025
10)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	991	787	79.41 %	2025
11)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	165	126	76.36 %	2025
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	45	83.33 %	2025
13)	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	87	66	75.86 %	2025
14)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	3.597	3.597	100.00 %	2025
3)	Kader Kesehatan	Orang	97	78	67.61 %	2025
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	42560	27213	63,94%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					82,27%	2025
1)	Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	42.560	27.213	63.94%	2025
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	42.560	27.213	63.94%	2025
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	42.560	21.122	49.63%	2025
4)	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	6.323	6.323	100.00%	2025
5)	Vitamin A Merah(sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	85.120	62.250	73.13%	2025
6)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2.136	2.051	96.02%	2025
7)	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	4.230	4.077	96.38%	2025
8)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	1.581	1.359	85.96%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
9)	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	4.743	4.534	95.59%	2025
10)	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	904	904	100.00%	2025
11)	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	2.851	1.470	51.56%	2025
12)	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	1833	932	50.85%	2025
13)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	63.676	53.377	83.83%	2025
14)	Peralatan Anafilaktik	Paket	24	23	95.83%	2025
15)	Formula terapi gizi buruk	Paket	6	6	100.00%	2025
16)	Tenaga medis : Dokter	Orang	91	74	81.32%	2025
17)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	920	776	84.35%	2025
18)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	991	787	79.41%	2025
19)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	66	75.86%	2025
20)	Guru PAUD	Orang	0	0	100.00%	2025
21)	Kader kesehatan	Orang	3.597	3.597	100.00%	2025
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	71.265	67.598	94,85%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					87,22	2025
1)	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/ Buku	67.702	67.598	99.85%	2025
2)	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA,	Form/ Buku	3563	0	0.00%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
	lapas/LPKA dan Posyandu remaja)					
3)	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	71.265	67.598	94.85%	2025
4)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)	Formulir	24	24	100.00%	2025
5)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	24	24	100.00%	2025
6)	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	2.352.766	2.352.766	100.00%	2025
7)	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	24	24	100.00%	2025
8)	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	7.592	7.200	94.84%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
9)	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	24	24	100.00%	2025
10)	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	8.009	8.009	100.00%	2025
11)	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	99	90	90.91%	2025
12)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	920	776	84.35%	2025
13)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	991	787	79.41%	2025
14)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	66	75.86%	2025
15)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	165	126	76.36%	2025
16)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	249	183	73.49%	2025
17)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1.075	1.075	100.00%	2025
18)	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	3.597	3.597	100.00%	2025
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	273.374	132.039	48,30%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					48,95%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	102	24	23.53%	2025
2)	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	283	24	8.48%	2025
3)	Alat : Tensimeter	Unit	283	24	8.48%	2025
4)	Alat : Glukometer	Unit	283	24	8.48%	2025
5)	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	283	24	8.48%	2025
6)	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	273.374	132.039	48.30%	2025
7)	Alat : KIT IVA Tes	Unit	24	11	45.83%	2025
8)	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	10.189	10.189	100.00%	2025
9)	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	283	20	7.07%	2025
10)	Kuesioner PUMA	Dokumen	0	0	0.00%	2025
11)	Alat Pelayanan KB	Unit	72	22	30.56%	2025
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	24	11	45.83%	2025
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	24	11	45.83%	2025
	Vasektomi set	Unit	24	0	0.00%	2025
12)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	273.374	132.039	48.30%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
13)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/ Vial	1.272	1.249	98.19%	2025
14)	Tenaga medis : Dokter	Orang	91	74	81.32%	2025
15)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	920	776	84.35%	2025
16)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	991	787	79.41%	2025
17)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	66	75.86%	2025
18)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	249	183	73.49%	2025
19)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3.597	3.597	100.00%	2025
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	34.813	31.935	91,73%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					71,03%	2025
1)	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	283	118	41.70%	2025
2)	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	283	66	23.32%	2025
3)	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	283	66	23.32%	2025
4)	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	34.761	31.935	91.87%	2025
5)	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	34.761	28.815	82.89%	2025
6)	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	34.761	28.815	82.89%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	34.761	28.815	82.89%	2025
8)	Tenaga medis : Dokter	Orang	91	74	81.32%	2025
9)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	920	776	84.35%	2025
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	991	787	79.41%	2025
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	66	75.86%	2025
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	249	183	73.49%	2025
13)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3.597	3.597	100.00%	2025
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	67.313	18.334	27,24%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					61,41%	2025
1)	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	102	24	23.53%	2025
2)	Obat Hipertensi	Paket	67.313	18.334	27.24%	2025
3)	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	283	24	8.48%	2025
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	24	24	100.00%	2025
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	102	24	23.53%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang	91	74	81.32%	2025
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	920	776	84.35%	2025
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	991	787	79.41%	2025
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	66	75.86%	2025
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	54	45	83.33%	2025
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	165	126	76.36%	2025
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	249	183	73.49%	2025
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	6.106	4.459	73,03%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					69,27%	2025
1)	Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	6.106	4.459	73.03%	2025
2)	Fotometer atau Glukometer	Unit	283	24	8.48%	2025
3)	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	6.106	4.459	73.03%	2025
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	24	24	100.00%	2025
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	102	24	23.53%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang	91	74	81.32%	2025
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	920	776	84.35%	2025
8)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	991	787	79.41%	2025
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	165	126	76.36%	2025
10)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	249	183	73.49%	2025
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	87	66	75.86%	2025
12)	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	74	61	82.43%	2025
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	1.259	739	58,70%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					71,11%	2025
1)	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	24	24	100.00%	2025
2)	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	5	5	100.00%	2025
3)	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	1.259	739	58.70%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
4)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	24	24	100.00%	2025
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	102	102	100.00%	2025
6)	Tenaga medis : Dokter	Orang	91	74	81.32%	2025
7)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	3	0	0.00%	2025
8)	Tenaga profesional lainnya	Orang	3	0	0.00%	2025
9)	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	24	24	100.00%	2025
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	7.090	4.426	62,43%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					76,08%	2025
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	112	112	100.00%	2025
2)	Reagen Zn TB	Kit	453	143	31.57%	2025
3)	Masker bedah dan Masker N95	Paket	9.497	9.497	100.00%	2025
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	23.679	23.679	100.00%	2025
5)	Katrid tes cepat molekuler	Tes	4.084	4.084	100.00%	2025
6)	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	7.090	4.426	62.43%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	34	34	100.00%	2025
8)	Tuberkulin	Vial	253	38	15.02%	2025
9)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	98	76	77.55%	2025
10)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	991	787	79.41%	2025
11)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	165	126	76.36%	2025
12)	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	249	183	73.49%	2025
13)	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	74	61	82.43%	2025
14)	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	28	12	42.86%	2025
15)	Kader Kesehatan	Orang	3.597	3.597	100.00%	2025
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	7.188	6.220	86,53%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					74,34%	2025
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	112	86	76.79%	2025
2)	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	7.907	7.907	100.00%	2025
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	79.07	6.220	78.66%	2025
4)	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis,	Paket	7.188	6.220	86.53%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
	nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK					
5)	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	93	76	81.72%	2025
6)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	920	776	84.35%	2025
7)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	991	787	79.41%	2025
8)	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	74	61	82.43%	2025
9)	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	249	183	73.49%	2025
10)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0.00%	2025

B. Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.741.825.000	1,556,642,280	89.37
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	883.796.350	237,478,625	26.87
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	280.920.000	133,259,985	47.44
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	49.950.000	49,870,080	99.84
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.353.903.000	2,122,516,084	90.17

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	0
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	248.880.000	236,099,000	94.86
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	0
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	0
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	539.290.000	467,550,488	86.70
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	445.785.000	444,188,434	99.64
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	51.020.000	50,953,370	99.87
JUMLAH			6.595.369.350	5.298.558.346	80.34

C. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- 1) Masih terjadi keterlambatan laporan realisasi layanan dasar dari Puskesmas
- 2) Data realisasi layanan dasar yang dilaporkan oleh Puskesmas sering tidak sinkron dan sering dilakukan revisi data
- 3) Sebagian besar indikator SPM Kesehatan telah dialokasikan anggaran namun jumlah masih belum mencukupi kebutuhan
- 4) Masih ada komponen mutu layanan dasar yang belum teralokasikan anggaran
- 5) Masih terdapat penanggung jawab program di Puskesmas yang belum memahami definisi operasional serta petunjuk teknis yang menyebabkan tidak sinkronnya pelaporan realisasi layanan dasar dan sering dilakukan revisi data

- 6) Masih terdapat penanggung jawab program di Dinas Kesehatan yang belum memahami petunjuk teknis komponen mutu layanan dasar

1. Solusi

- 1) Selalu mengingatkan penanggung jawab program untuk segera melaporkan realisasi layanan dasar
- 2) Melakukan sinkronisasi dan validasi data laporan realisasi layanan dasar sebelum dilakukan penginputan pada aplikasi dan dibuatkan berita acara validasi data
- 3) Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong melakukan evaluasi bersama bidang-bidang pengampu program yang masuk sebagai indikator SPM bidang kesehatan untuk pengalokasian anggaran penerapan SPM bidang kesehatan pada tahun berikutnya
- 4) Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong melakukan evaluasi bersama bidang-bidang pengampu program yang masuk sebagai indikator SPM bidang kesehatan untuk pengalokasian anggaran penerapan SPM bidang kesehatan pada tahun berikutnya
- 5) Penanggung jawab program Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong melakukan desk baik secara luring maupun daring dengan penanggung jawab program Puskesmas untuk menyamakan persepsi tentang petunjuk teknis penerapan SPM bidang kesehatan
- 6) Operator aplikasi eSPM Bangda Kemendagri duduk bersama untuk melakukan penyamaan persepsi tentang petunjuk teknis penerapan SPM bidang kesehatan

2.3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	632	632	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
Jaringan Perpipaan						
Kuantitas SPAM						
1)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	158	158	100%	2025
Kualitas SPAM						
2)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	158	158	100%	2025
Bukan Jaringan Perpipaan						
Kuantitas SPAM						
1)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0%	2025
Kualitas SPAM						
2)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak	Rumah Tangga	0	0	0%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
	berbau, dst.					
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	1.363	1.363	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
Kuantitas SPALD						
1)	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	358	358	100%	
Kualitas SPALD						
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
2)	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%	2025
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)						
3)	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	0	0	0%	2025
4)	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang	Rumah Tangga	358	358	100%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
	bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar					

B. Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.803.589.500	1.627.240.748	90.22%
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah	1.803.589.500	1.627.240.748	90.22%
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	170.100.000	169.527.500	99.66%
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000	99.991.800	99.99%
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.344.921.500	1.180.660.940	87.79%
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	188.568.000	177.060.508	93.90%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	14.050.598.500	7.233.224.416	51.48 %

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	Limbah Domestik	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah	14.050.598.500	7.233.224.416	51.48%
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	7.321.600.000	605.997.200	8.28%
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.659.266.500	6.558.508.936	98.49%
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	69.732.000	68.718.280	98.55%
JUMLAH			15.854.188.000	8.860.465.164	

C. Permasalahan dan Solusi

SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Parigi Moutong secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan

- 1) Kurangnya Sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data
- 2) Sulitnya menentukan kriteria penerima serta belum terjalannya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dengan data yang dibutuhkan
- 3) Belum konsistensinya prioritas anggaran terkait SPM (adanya refocusing anggaran untuk kegiatan SPM) yang berpengaruh terhadap capaian SPAM Air minum dan Air Limbah.

- 4) Pengumpulan data yang belum tersedia mengakibatkan langkah-langkah penerapan selanjutnya terkendala seperti perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan.

2. Solusi

- 1) Perlunya menyediakan dokumen rencana induk sistem penyelenggaraan air minum dan air limbah sebagai bagian integrasi secara menyeluruh dalam pengelolaan dan penyediaan air minum dan air limbah.
- 2) Perlunya koordinasi stakeholder terkait terutama Biro Pemerintahan sebagai leader dalam penyelenggaraan SPM di Daerah. Sehingga dalam menjalankan rencana aksi SPM lebih terarah dan efisien

2.4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	10	10	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
1)	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%	2025
2)	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	10	10	100%	2025
3)	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	10	10	100%	2025
4)	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%	2025
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
1)						
2)						
3)						

B. Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Pengembangan Perumahan			
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Perumahan			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
JUMLAH					

C. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahannya adalah untuk pemenuhan SPM secara maksimal pastinya diperlukan anggaran yang maksimal dan juga untuk kegiatan relokasi belum bisa dilaksanakan karena untuk ketersediaan lokasi belum tersedia

2. Solusi

Memaksimalkan seluruh sumberdaya yang tersedia agar pelayanan lebih maksimal

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

A. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/ Kota	Orang	6	5	83,33%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					28,33%	2025
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	40	19	47,50%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Unit Rumah	5	2	40%	2025
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	40	33	82,50%	2025
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	5	0	0%	2025
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0%	2025
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0%	2025
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Orang	10	20	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					66,67%	2025
1)	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15	layanan	5	15	66,67%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
	menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi					
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	100%	2025
3)	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	1	0	0%	2025
4)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	1	51	100%	2025
5)	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	2	2	100%	2025
6)	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	2	0	0%	2025

B. Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	756.350.900	738.223.570	97.60%
A		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	696.655.400	680.613.551	97.70%

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1)		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	133.617.150	132.386.350	99.08%
2)		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	5.798.600	5.048.600	87.07%
3)		Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	5.776.000	5.776.000	100.00%
4)		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	548.211.650	534.510.601	97.50%
5)		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	3.252.000	2.892.000	88.93%
B		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.484.500	21.131.539	98.36%
1)		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	7.172.500	7.155.539	99.76%
2)		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	14.312.000	13.976.000	97.65%
C		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	38.211.000	36.478.480	95.47%

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1)		Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	38.211.000	36.478.480	95.47%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	248.606.680	243.124.734	97.79%
A		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	247.315.580	241.833.634	97.78%
1)		Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	6.098.100	6.098.100	100.00%
2)		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	58.278.300	58.271.700	99.99%
3)		Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	30.125.500	29.025.500	96.35%
4)		Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	35.157.900	35.143.300	99.96%
5)		Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	117.655.780	113.295.034	96.29%
B		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.291.100	1.291.100	100.00%

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1)		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	1.291.100	1.291.100	100.00%

C. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- 1) Kurang Pahamnya Masyarakat dalam Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada, Sehingga tidak Adanya Aduan Masyarakat yang diterima Oleh SATPOLPP
- 2) Belum Adanya Peningkatan Kapasitas Aparatur PPNS dalam Menegakkan Perda dan Perkada dan Untuk Proses Penyidikan Tindak Pidana Ringan.
- 3) Luas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang Tidak Sebanding dengan Sarpras yang ada di Damkar Saat ini

2. Solusi

- 1) Dilaksanakannya Sosialisasi Lebih Lanjut dalam Pengaduan Pelanggaran Perda Perkada Kepada Masyarakat serta mengoptimalkan Anggaran untuk pemenuhan layanan SPM trantibum

2.5.2. Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

A. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	1.288	1.288	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
1)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana					
a	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalisir minimal perkada dengan lampiran dalam	dokumen	1	1	100%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
	bentuk kajian dan album peta					
b	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	100%	2025
2)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana					
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana					
a	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1288	1288	100%	2025
b	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	6	6	100%	2025
c	Tersedianya Narasumber/ Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	100%	2025
d	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	100%	2025
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia					
a	Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	4	4	100%	2025
b	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	48	48	100%	2025
c	Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	100%	2025
d	Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	100%	2025
e	Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	9	9	100%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik						
a	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	178	178	100%	2025
b	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	38	38	100%	2025
c	Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	100%	2025
d	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	100%	2025
e	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	100%	2025
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	1.342	1.342	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
1)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana					
	Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalakan dalam bentuk perkara	dokumen	1	1	100%	
	Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1	1	100%	
2)	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)					
	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	100%	
	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	0	0		
	Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0		
	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
3)	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi					
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur					
a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0		
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0		
c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0		
d	Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0		
e	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0		
f	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0		
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					
a	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	100%	
b	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	134	134	100%	
c	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0		
d	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	100%	
e	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	100%	
4)	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
	Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)					
a	Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai	dokumen	1208	1208	100%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
	dengan kebutuhan)					
b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	100%	
c	Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	100%	
	Gladi Lapang					
a	Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0		
b	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0		
c	Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0		
5)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
a	Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	100%	
b	Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	0	0		
c	Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	100%	
d	Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	100%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
e	Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0		
Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana						
a	Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	100%	
b	Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	100%	
c	Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	100%	
d	Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	100%	
Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast						
a	Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100%	
b	Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0		
Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat						
a	Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0		
b	Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0		
6)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
a	Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai	paket	4	4	100%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
	dengan kebutuhan)					
b	Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	100%	
c	Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	100%	
d	Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	4	100%	
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.415	7.415	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					74,17%	2025
1)	Respon Cepat Darurat Bencana					
	Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	119	119	100%	
	Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	9	9	100%	
	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	16	16	100%	
2)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					
a	Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100%	
b	Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0		
c	Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
d	Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	9	9	100%	
e	Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	9	9	100%	
3)	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana					
a	Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	100%	
b	Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	100%	
c	Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0		
d	Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0		
e	Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	119	119	100%	
f	Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	16	16	100%	
g	Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0		
h	Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	16	16	100%	

B. Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1		Program Penanggulangan Bencana	1.304.084.400	1.261.845.152	96.76 %
	Pelayanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	91.218.450	90.793.000	99.53%
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	91.218.450	90.793.000	99.53%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	785.118.700	751.775.576	95.75%
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	74.084.625	43.635.000	58.90%
		Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	453.662.950	451.611.184	99.55%
		Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	77.318.800	77.256.293	99.92%
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	32.319.600	32.319.600	100.00%
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	33.495.500	33.409.700	99.74%
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	114.237.225	113.543.799	99.39%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	161.401.250	153.868.500	95.33 %
		Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	113.413.250	106.151.500	93.60%

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	23.150.000	23.150.000	100.00%
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	24.838.000	24.567.000	98.91%
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	266.346.000	265.408.076	99.65%
		Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	74.889.800	74.253.800	99.15%
		Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	10.343.000	10.309.000	99.67%
		Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	79.961.500	79.822.800	99.83%
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	101.151.700	101.022.476	99.87%
JUMLAH			1.304.084.400	1.261.845.152	96.76%

C. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- 1) Warga Negara yang berada dikawasan rawanbencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/ kota belum terdata secara baik
- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD
- 3) Kebutuhan Pemenuhan Anggaran
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat, Dunia Usaha untuk berperan serta aktif dalam upaya pengurangan risikobencana dan penanganan bencana
- 5) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaankepada masyarakat
- 6) Belum Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana

- 7) Sarana dan Prasarana yang dimiliki kurang memadai dalam pelayanan evakuasi

2. Permasalahan

- 1) Melakukan pendataan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/ kota secara menyeluruh
- 2) Penambahan jumlah personil PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Struktural maupun diklat fungsional/bimtek
- 3) Peningkatan/penambahan anggaran
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat, Dunia Usaha untuk berperan serta aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana
- 5) Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
- 6) Perlu peningkatan dalam Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana
- 7) Perlu peningkatan dalam Sarana dan Prasarana

2.6. Urusan Sosial

A. Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	137	137	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
1)	Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	100%	2025
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	100%	2025
3)	Penyediaan permakanan	Orang	81	81	100%	2025
4)	Penyediaan sandang	Orang	81	81	100%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
5)	Penyediaan alat bantu	Orang	10	10	100%	2025
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	100%	2025
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	30	30	100%	2025
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	30	30	100%	2025
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	9	9	100%	2025
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	100%	2025
11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	100%	2025
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	100%	2025
13)	Layanan rujukan	Orang	1	1	100%	2025
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Orang	34	34	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
1)	Layanan data dan pengaduan	orang	1	1	98.53%	2025
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	1	1	100%	2025
3)	Penyediaan permakanan	Orang	33	33	100%	2025
4)	Penyediaan sandang	Orang	33	33	100%	2025
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	1	1	100%	2025
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	100%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	1	1	100%	2025
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	100%	2025
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	100%	2025
10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	100%	2025
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	100%	2025
12)	Layanan rujukan	Orang	1	1	100%	2025
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	471	471	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
1)	Layanan data dan pengaduan	Orang	31	31	100%	2025
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	31	31	100%	2025
3)	Penyediaan permakanan	Orang	403	403	100%	2025
4)	Penyediaan sandang	Orang	403	403	100%	2025
5)	Penyediaan alat bantu	Orang	44	44	100%	2025
6)	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	22	22	100%	2025
7)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	17	17	100%	2025
8)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	44	44	100%	2025
9)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	100%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
10)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	31	31	100%	2025
11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	44	44	100%	2025
12)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	100%	2025
13)	Layanan rujukan	Orang	0	0	100%	2025
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	12	12	100%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%	2025
1)	Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	100%	2025
2)	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	100%	2025
3)	Penyediaan permakanan	Orang	12	12	100%	2025
4)	Penyediaan sandang	Orang	12	12	100%	2025
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	100%	2025
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	100%	2025
7)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	100%	2025
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	100%	2025
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	100%	2025
10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	100%	2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM dan Mutu Layanan	Satuan	Indikator Pencapaian		Total Pencapaian	Waktu Capaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Yang Terlayani/ Terpenuhi		
1	2	3	4	5	6	7
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0		2025
12)	Layanan rujukan	Orang	0	0		2025
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	400	351	87,75%	2025
Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					97,55%	2025
1)	Penyediaan permakanan	Orang	400	351	87.75 %	2025
2)	Penyediaan sandang	Orang	350	351	100%	2025
3)	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	2	2	100%	2025
4)	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	20	20	100%	2025
5)	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	50	50	100%	2025

B. Alokasi Anggaran

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	1.211.474.570	1.203.237.383	99.32%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	984.450.070	977.183.683	99.26%

NO	JENIS LAYANAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan permakanan	348.619.850	347.169.250	100%
		Penyediaan sandang	246.464.399	245.608.450	100%
		Penyediaan alat bantu	208.869.000	208.580.000	100%
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6.235.000	6.233.000	100%
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	148.156.621	147.342.983	100%
		Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	22.250.000	22.250.000	100%
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3.855.200	0	0%
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	227.024.500	226.053.700	99.57%
		Penyediaan makanan	94.437.500	94.322.500	99.88%
		Penyediaan sandang	104.270.000	104.100.000	99.84%
		Pelayanan dukungan Psikososial	28.317.000	27.631.200	97.58%
JUMLAH			304.406.374	258.581.050	99.32%

C. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- 1) Belum adanya Fokus Anggaran belanja khusus di pemenuhan dasar SPM'
- 2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Pelaksana pemenuhan layanan dasar di lapangan yang belum memadai.
- 3) Belum adanya populasi data yang valid dari setiap kecamatan untuk target penerima layanan dasar SPM.

2. Solusi

- 1) Pimpinan OPD wajib mengalokasikan anggaran khusus belanja pemenuhan SPM minimal 15 % dari Pagu OPD yang ada

- 2) Melakukan Pelatihan atau bimbingan teknis khusus untuk Tenaga kesejahteraan Sosial yang menangani layanan dasar SPM Sosial.
- 3) Melaksanakan Rapat Koordinasi secara langsung atau melalui via zoom setiap triwulan dengan pihak Kecamatan untuk penyiapan data populasi penerima layanan dasar SPM serta pelaksanaan layanan dasar SPM di kecamatan

3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya

3.1. Hasil EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Tahun Sebelumnya

EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap kinerja pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)** yang disampaikan setiap tahun oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat.

Tujuan EPPD adalah :

1. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
2. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agar daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen pemerintahan.
3. Sebagai Dasar Pemberian Penghargaan Daerah dengan kinerja terbaik akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.
4. Sebagai Bahan Evaluasi Kebijakan Nasional Hasil EPPD digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah.

Sampai dengan laporan ini dibuat hasil EPPD Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum dirilis sehingga tidak dapat disajikan.

3.2. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Opini Laporan Keuangan Daerah adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini ini menunjukkan apakah laporan keuangan suatu pemerintah daerah telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan prinsip akuntansi yang berlaku.

Opini laporan keuangan yang diberikan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** memiliki dampak signifikan terhadap **kinerja keuangan daerah**. Yang bermanfaat :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

- Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**.
- Pemerintah daerah yang mendapatkan opini baik cenderung lebih transparan dalam penggunaan anggaran, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Menjadi Tolak Ukur Tata Kelola Keuangan Daerah

- Opini laporan keuangan menjadi indikator dalam menilai efektivitas pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.
- Daerah dengan opini **WTP** menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dalam mengelola keuangan publik.

3. Meningkatkan Daya Saing dan Reputasi Daerah

- Opini yang baik dapat meningkatkan citra pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, sehingga mempermudah dalam menarik investasi dan bantuan dari pemerintah pusat maupun pihak lain.
- Daerah dengan opini **WTP** lebih berpeluang mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat melalui Dana Insentif Daerah (DID).

4. Memudahkan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

- Dengan opini laporan keuangan yang baik, pemerintah daerah lebih mudah dalam menyusun anggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien.
- Opini keuangan membantu dalam perbaikan sistem akuntansi dan keuangan daerah untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

5. Meningkatkan Kepercayaan Publik dan DPRD

- Opini laporan keuangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan DPRD terhadap pemerintah daerah.
- Dengan meningkatnya kepercayaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah juga cenderung meningkat.

6. Mendorong Perbaikan dan Reformasi Keuangan Daerah

- Jika daerah mendapatkan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atau **Tidak Wajar (TW)**, maka pemerintah daerah dapat menggunakan hasil audit untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan mereka.
- Rekomendasi dari BPK dalam auditnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan reformasi tata kelola keuangan daerah.

Dengan demikian, opini laporan keuangan bukan hanya sekadar penilaian, tetapi juga menjadi alat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Berikut Disajikan Opini Laporan Keuangan Kabupaten Parigi Moutong :

TAHUN	NO. SURAT KEPUTUSAN	OPIN BPK	KETERANGAN
2025			DALAM TAHAP AUDIT BPK
2024	0163/S/XIX.PLU/05/2025	WDP	
2023	08.A/LHP/XIX.PLU/05/2024	WDP	
2022	05.A/LHP/XIX.PLU/05/2023	WTP	
2021	08.A/LHP/XIX.PLU/05/2022	WTP	
2020	13.A/LHP/XIX.PLU/05/2021	WTP	
2019	14.A/LHP/XIX.PLU/05/2020	WTP	

4. Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah

4.1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan;

Sesuai dengan pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah
2. Pendapatan Transfer yaitu :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu:
 - a. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, perlu adanya usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD/ Bank Pembangunan Daerah Sulteng, serta Lain-lain PAD Yang Sah yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun lalu. Disamping itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kerjasama antar Perangkat Daerah penghasil untuk meningkatkan PAD.

Eksentifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan

pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan (Pemutakhiran Data). Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak yang ada di wilayah.

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi sistem pemungutan pajak daerah dan melakukan penyempurnaan yang diperlukan. Upaya ini dimaksudkan agar terjadi efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak tersebut;
2. Mengevaluasi peraturan perpajakan daerah yang berlaku dan menyempurnakannya bilamana diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengintensifkan perolehan pajak;
3. Meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dalam pemungutan pajak daerah. SDM yang memiliki kemampuan yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian target pajak daerah yang telah ditetapkan;
4. Menciptakan sistem penatausahaan penerimaan pajak daerah termasuk pengawasan tunggakan pajak daerah. Upaya ini dilakukan dengan maksud agar tercipta dokumentasi yang memadai tentang besarnya penerimaan pajak daerah, termasuk informasi tentang tunggakan pajak daerah yang terjadi pada periode tertentu. Dokumentasi yang memadai juga akan memudahkan pengawasan atas penerimaan pajak daerah tersebut;
5. Perbaiki fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan mengevaluasi dasar penetapan besarnya tarif retribusi, terutama retribusi pelayanan kesehatan. Upaya ini harus dilakukan secara bersamaan, artinya di satu sisi dilakukan perbaikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan disisi lain harus segera dilakukan peninjauan ulang dasar dan perhitungan *unit cost* setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya akan dapat ditetapkan besarnya tarif retribusi yang sesuai antara kualitas layanan dan kemampuan masyarakat;
6. Mengoptimalkan sosialisasi tentang pentingnya memiliki izin. Upaya ini dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai perizinan. Pemahaman yang memadai pada akhirnya akan menumbuhkan motivasi untuk mengurus izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;

7. Meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini sangat penting karena kemudahan pelayanan tercipta tidak hanya dapat dilakukan dengan sekedar memperbaiki sistem dan kebijakan tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan SDM pelaksananya;
8. Mengevaluasi mekanisme pengurusan izin. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki mekanisme pengurusan izin apabila diperlukan. Kejelasan dan kemudahan mekanisme akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin tersebut; dan
9. Mengoptimalkan pengawasan pengelolaan penerimaan dari hasil retribusi daerah. Pengawasan yang optimal akan meminimalkan penyimpangan atas hasil penerimaan retribusi tersebut. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan yang relevan, sistem pengawasan, dan SDM terkait.

Adapun jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - k. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - l. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
 - m. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - n. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - o. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari 5 Jenis meliputi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar
- 5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 6 Jenis meliputi:
 - 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - 6) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari 3 Jenis meliputi:
 - 1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
4. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - c. Jasa Giro
 - d. Pendapatan Bunga
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - h. Pendapatan dari Pengembalian
 - i. Pendapatan BLUD

B. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut : **Realisasi Pendapatan Daerah**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih / (Kurang)	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	179.868.960.954,00	190.798.662.228,23	10.929.701.274,23	106,08
PENDAPATAN TRANSFER	1.597.587.938.783,90	1.490.975.965.552,26	(106.611.973.231,64)	93,33
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.809.536.531,00	38.321.473.344,00	(6.488.063.187,00)	85,52
Jumlah	1.822.266.436.268,90	1.720.096.101.124,49	(102.170.335.144,41)	94,39

*) Sebelum audit BPK

Tahun 2025 Pendapatan Daerah memiliki target sebesar Rp1.822.266.436.268,90 dan terealisasi sebesar Rp1.720.096.101.124,49 atau 94,39%. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih / (Kurang)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	57.913.204.000,00	60.314.621.023,39	2.401.417.023,39	104,15
Pajak Reklame	728.000.000,00	1.004.420.909,75	276.420.909,75	137,97
Pajak Air Tanah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	41.320.000,00	1.320.000,00	103,30
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	272.166.398,48	272.166.398,48	0,00

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih / (Kurang)	%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.000,00	6.865.408.550,32	865.408.550,32	114,42
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000,00	1.778.580.748,00	578.580.748,00	148,22
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	470.000.000,00	661.073.994,84	191.073.994,84	140,65
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	14.970.204.000,00	16.356.558.978,00	1.386.354.978,00	109,26
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.800.000.000,00	15.212.409.311,00	(1.587.590.689,00)	90,55
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.700.000.000,00	18.122.682.133,00	422.682.133,00	102,39
Retribusi Daerah	5.328.755.083,00	4.810.059.732,00	(518.695.351,00)	90,27
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.053.755.083,00	2.748.199.295,00	(305.555.788,00)	89,99
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	306.080.000,00	356.443.000,00	50.363.000,00	116,45
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	130.000.000,00	146.084.000,00	16.084.000,00	112,37
Retribusi Pelayanan Pasar	462.520.000,00	317.599.975,00	(144.920.025,00)	68,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	189.000.000,00	99.068.000,00	(89.932.000,00)	52,42
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	41.400.000,00	41.600.000,00	200.000,00	100,48
Retribusi Tempat Pelelangan	20.000.000,00	53.315.000,00	33.315.000,00	266,575
Retribusi Rumah Potong Hewan	60.000.000,00	25.400.000,00	(34.600.000,00)	42,33
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	460.000.000,00	396.289.434,00	(63.710.566,00)	86,15
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	106.000.000,00	121.150.000,00	15.150.000,00	114,29
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	504.911.028,00	4.911.028,00	100,98

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih / (Kurang)	%
Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.179.371.796,00	8.179.371.796,00	0,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.179.371.796,00	8.179.371.796,00	0,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	108.447.630.075,00	117.494.609.676,84	9.046.979.601,84	108,34
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	382.908.300,00	(67.091.700,00)	85,09
Jasa Giro	927.256.167,00	1.416.410.692,00	489.154.525,00	152,75
Pendapatan Bunga	0,00	27.453.631,00	27.453.631,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.097.019.445,00	200.000,00	(5.096.819.445,00)	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	705.317.355,00	706.481.360,12	1.164.005,12	100,17
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	417.742.828,52	417.742.828,52	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	268.037.108,00	9.325.241.025,33	9.057.203.917,33	3479,09
Pendapatan BLUD	101.000.000.000,00	105.218.171.839,87	4.218.171.839,87	104,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	179.868.960.954,00	190.798.662.228,23	10.929.701.274,23	106,08

*) Sebelum audit BPK

Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.179.868.960.954,00 dan terealisasi yaitu sebesar Rp190.798.662.228,23 atau mencapai 106,08%. Melebihi dari target yang ditetapkan. Dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pajak daerah Tahun 2025 di targetkan sebesar Rp57.913.204.000,00 dan terealisasi sebesar Rp60.314.621.023,39 atau mencapai 104,15%.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi pada Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Reklame terdiri atas 3 jenis, yakni Reklame Papan, Reklame kain dan Reklame berjalan. Semua jenis reklame yang dimaksud, Tahun 2025 realisasinya melampaui target yang ditetapkan. Pada LRA SIPD untuk pajak reklame kain dan pajak reklame berjalan tidak Mencapai target, jika di sandingkan pencatatan manual atau laporan realisasi dengan bidang pembukuan terdapat selisih lebih atau telah mencapai target. Laporan manual telah melalui proses verifikasi dokumen penerimaan dan mencocokkan rekening koran RKUD. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Bapenda dalam melakukan pendataan, Penagihan dan melakukan pemeriksaan atas beberapa wajib pajak yang menunggak dengan melibatkan pihak kejaksaan;
- b. Tahun 2025 pajak Air Tanah tidak mencapai terget, Hal ini disebabkan masih terkendala dengan regulasi atau menunggu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Perhitungan Tarif Nilai Perolehan Air Tanah;
- c. Pajak Sarang burung Walet tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan. Tercapainya target bahkan melampaui tidak lepas dari aktifnya kegiatan penagihan dan sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak;
- d. Besarnya persentase penerimaan PBB-P2 ini, dipengaruhi oleh kegiatan penagihan yang terus digenjot serta diberlakukan kembali rekomendasi atau surat keterangan realisasi capaian PBB-P2 sebagai persyaratannya pencairan ADD dan bagi hasil PDRD. Selain itu kegiatan pemeriksaan yang melibatkan pihak Kejaksaan kepada yang menunggak PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan;
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melampaui target dikarenakan banyaknya transaksi jual beli tanah di wilayah Parigi Moutong utamanya lahan untuk tambak dan pabrik durian, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan dan transaksi jual beli lainnya;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau lebih dikenal dengan Pajak Galian Jenis C mencapai target. Adapun yang mempengaruhi tercapainya penerimaan Pajak Minerba, antara lain, Adanya kepatuhan Wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah Baik pekerjaan fisik yang menggunakan material galian jenis C yang anggaran bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Selain itu

- tercapainya target bahkan melampaui tidak lepas dari aktif dari Badan Pendapatan Daerah kegiatan penagihan dan sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak;
- g. Realisasi Penerimaan Pajak Barang Tertentu (PBJT) Restoran/Rumah Makan tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan pada APBD Perubahan, jumlah capaian juga mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024. Kenaikan target dan realisasi ini dipengaruhi oleh aktifnya kegiatan penagihan yang dilakukan, sosialisasi terhadap wajib pajak, Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak yang melibatkan Pihak Kejaksaaan dan mengoptimalkan penerbitan Rekomendasi atau penelitian Nota/Bill atas Belanja Makan Minum yang ada pada Perangkat Daerah;
 - h. Realisasi PBJT Tenaga Listrik, Melampaui Target target yang tetapkan, Kenaikkan yang singnifikan ini disebabkan meningkatnya Pelaku usaha di wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang menggunakan Daya Listrik yang cukup besar sehingga PBJT-Tenaga Listrik Realisasinya Sangat Melonjak dari target yang ditetapkan;
 - i. Realisasi Penerimaan Pajak Barang Tertentu (PBJT) Hotel/Penginapan tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan pada APBD Perubahan, jumlah capaian juga mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024. Kenaikan target dan realisasi ini dipengaruhi oleh aktifnya kegiatan penagihan yang dilakukan, sosialisasi terhadap wajib pajak dan mengoptimalkan penerbitan Rekomendasi atau penelitian Nota/Bill yang digunakan pegawai dalam belanja perjalanan Dinas dalam Daerah masing-masing perangkat Daerah;
 - j. PBJT – jasa parkir pada LRA SIPD tidak mencapai target, jika di sandingkan dengan pencatatan manual bidang pembukuan jasa parkir telah mencapai target atau terdapat selisih lebih antara LRA SIPD dan laporan manual. Laporan manual telah melalui proses Verifikasi dokumen penerimaan dan mencocokkan rekening koran RKUD;
 - k. Realisasi Penerimaan Barang Tertentu (PBJT) Pajak Hiburan, yang terdiri dari Pacuan Kuda, kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan Volyball, Permandian, Pada Tahun 2025 melampaui target dari besaran Target yang ditetap, namun dibandingkan Target dan realisasi pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan Angka hal disebabkan agak berkurangnya oleh intensitas pelaksanaan Turnamen olahraga, serta terbukanya beberapa tempat hiburan dan permandian serta wahana bermain hoya-hoya selama tahun 2025 sehingga mempengaruhi Penetapan target PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan tersebut;

1. Tahun 2025 pendapatan pajak mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta regulasi turunannya, yang mengatur bahwa sebagian kewenangan pemungutan PKB dan BBNKB dialihkan dalam bentuk opsen pajak kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, mulai Tahun 2025, pemerintah daerah secara langsung memperoleh bagian penerimaan melalui mekanisme opsen. Opsen pajak terdiri dari, opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp5.328.755.083,00 dan terealisasi sebesar Rp4.810.059.732,00 atau mencapai 90,27% dengan uraian sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

a) Retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp541.362.152,00 dari anggaran Rp1.053.755.083,00;
- b. Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum pada RSUD BULUYE, terealisasi sebesar Rp2.206.837.143,00 dari anggaran Rp2.000.000.000,00. Dikarenakan tersedianya dokter spesialis dasar;

b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikelola oleh 3 (Tiga) Perangkat Daerah yaitu:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dianggarkan Rp211.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp219.575.000,00 adanya peningkatan jumlah pedagang (kios dan lapak) di pasar-pasar daerah yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, penambahan pedagang baru secara otomatis memperluas basis

wajib retribusi , sehingga volume penerimaan harian dari sektor pasar meningkat;

- b. Dinas Lingkungan Hidup, dianggarkan Rp80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp121.668.000,00; dan
- c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah, dianggarkan Rp15.000.000,00 dan terealisasi Rp15.200.000,00.
- c) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kelola oleh Dinas Perhubungan tahun 2025 dianggarkan Rp130.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp146.084.000,00. Dikarenakan pengelolaan area parkir lebih efisien, volume kendaraan meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga menambah area parkir atau aktivitas pendukung bertambah;
- d) Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh 2 (Dua) Perangkat Daerah, yaitu:
 - a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dianggarkan Rp447.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp302.399.975,00. Retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari retribusi pelataran pasar, los dan kios. Tidak mencapai target, dikarenakan fasilitas kios pasar Parigi proses pemungutan retribusi baru efektif dilaksanakan pada bulan April 2025;
 - b) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.200.000,00;

2) Retribusi Jasa Usaha

- a) Tahun 2025 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp189.000.000,00 dan terealisasi Rp99.068.000,00 atau 52,42% dikarenakan kondisi alat yang kurang produktif lagi (tua/lama) potensi kerusakan lebih tinggi, sehingga kurang diminati oleh pelaksana;
- b) Retribusi pasar grosir/pertokoan di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melebihi target, dianggarkan Rp41.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.600.000,00;
- c) Retribusi tempat pelelangan di kelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp53.315.000,00;
- d) Retribusi Rumah Potong Hewan yang di kelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dianggarkan Rp60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.400.000,00 tidak mencapai target dikarenakan kurangnya fasilitas untuk

petugas pemungut retribusi, kurangnya daya beli masyarakat terhadap konsumsi daging, dan adanya wabah penyakit pada hewan, seperti wabah *African Swine Fever* (AFS) sehingga populasi pemotongan ternak babi tidak ada;

- e) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, dikelola oleh 2 (Dua) Perangkat Daerah, yaitu:
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan yang retribusinya bersumber dari pengelolaan *cold storage* berupa benih ikan dan udang dianggarkan Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp192.827.284,00 tidak mencapai target dikarenakan pengelolaan *Integrated Cold Storage* (ICS) di Boyantongo oleh pihak ketiga tidak berjalan sesuai dengan rencana dikarenakan minimnya pasokan bahan baku yang masuk ke fasilitas ICS;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan yang bersumber dari pendapatan UPTD air minum Spam dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00 terealisasi sebesar Rp203.462.150,00 dikarenakan Seringnya terjadi kerusakan jaringan, sehingga suplai air ke Pelanggan kurang lancar (mati/hidup). Akibatnya sebagian pelanggan yang terdampak enggan melakukan pembayaran;
- f) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas pemakaian atau penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh pihak ketiga (orang pribadi/badan) tanpa mengubah status kepemilikan, bertujuan untuk optimalisasi aset dan meningkatkan PAD, Aset yang digunakan umumnya tidak mengganggu fungsi dinas, Tahun 2025 dianggarkan Rp106.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp121.150.000,00;

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Tahun 2025 retribusi perizinan tertentu yaitu persetujuan bangunan gedung yang di kelola oleh Dinas Pekerjaan umum, Penata Ruang dan Pertanahan dianggarkan Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp504.911.028,00.

Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pembagian laba atas penyertaan modal pemerintah kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng). Pada Tahun 2025, bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) merupakan penyeteroran Dividen Tahun buku 2024. dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.179.371.796,00	8.179.371.796,00	100,00	7.175.716.029,00
	Jumlah	8.179.371.796,00	8.179.371.796,00	100,00	7.175.716.029,00

*) Sebelum audit BPK

Pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal kepada BPD Sulteng, sudah sesuai berdasarkan hasil pelaksanaan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 27 pada Tanggal 20 Januari 2025, dan di dukung dengan surat penyeteroran Dividen Nomor 1193/BPD-ST/DIR/OPR/VIII/2025 tentang Penyeteroran Dividen Tahun Buku 2024 ke RKUD sebesar Rp8.179.371.796,00 pada Tanggal 07 Maret 2025.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp108.447.630.075,00 dan terealisasi sebesar Rp117.494.609.676,84 atau 108,34%. Dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari hasil penjualan aset lainnya merupakan hasil penjualan kebun kelapa pada Daerah Ogobayas yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Tahun 2025 dianggarkan Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.000.000,00 atau 108,00%. Dan hasil penjualan aset lain-lain yaitu berupa aset rusak berat/usang yang

- dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang dianggarkan sebesar Rp425.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp355.908.300,00 atau 83,74%;
- 2) Penerimaan jasa giro tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp927.256.167,00 dan terealisasi sebesar Rp1.416.410.692,00 atau 152,75%. Penerimaan jasa giro terdiri dari:
 - a. Jasa giro pada Kas Daerah terealisasi sebesar Rp1.327.167.722,00;
 - b. Jasa giro pada Kas di Bendahara terealisasi sebesar Rp53.856.080,00;
 - c. Jasa giro pada rekening Dana Bos terealisasi sebesar Rp34.901.526,00;
 - d. Jasa giro pada rekening Dana Kapitasi pada FKTP terealisasi sebesar Rp485.364,00;
 - 3) Pendapatan bunga adalah pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah yang merupakan remunerasi atas penempatan uang *Treasury Deposit Facility* di Bank Indonesia terealisasi sebesar Rp27.453.631,00;
 - 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat atau lain, dianggarkan Rp5.097.019.445,00 dan terealisasi sebesar Rp200.000,00 atau 0,00%;
 - 5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan Rp705.317.355,00 dan terealisasi sebesar Rp706.481.360,02 Merupakan pengembalian denda atas keterlambatan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Set. PT. Cahaya Mas Cemerlang, atas Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Rekap Instalasi Jaringan TA. 2024, RSUD Raja Tombolotutu sebesar Rp5.055.181,00;
 - b. Set. atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Gedung PKM, Lompentodea TA. 2024, DINKES. Sebesar Rp291.330.611,00;
 - c. Set. I Nyoman Edi Suardana atas Denda Keterlambatan Pekerjaan, DINKES sebesar Rp375.251.563,00;
 - d. Set. CV. Bintang Sejati, atas Pengembalian Temuan BPK denda keterlambatan pekerjaan, sebesar Rp33.680.000,00;
 - e. Set. CV. Dian Ayu Sejahtera, atas Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Auma - Pakareme, DIS PUPRP sebesar Rp822.203,20;
 - f. Set. CV. Mahakarya Putra Mandiri, atas Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Suli, DISPUPRP sebesar Rp341.801,82.

- 6) Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp417.742.828,52, Pendapatan denda pajak daerah terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp18.000,00, denda Reklame terealisasi sebesar Rp997.051,00, Pendapatan Denda Pajak PBBP2 terealisasi sebesar Rp73.641.239,52, Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi sebesar Rp476.738,00, dan Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar Rp342.609.800,00;
- 7) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan sebesar Rp268.037.108,00 dan terealisasi Rp9.325.241.025,33 merupakan penerimaan dari setoran yang berasal dari temuan hasil pemeriksaan BPK maupun dari pemeriksaan Inspektorat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp63.753.748,20;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp325.830.648,00;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp94.755.996,00
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp99.284.660,03;
 - e. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa sebesar Rp177.964.111,15;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp107.900.000,00;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp796.494.989,00;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.001.974.168,00;
 - i. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp824.130.588,19;
 - j. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp643.487.013,99;

- k. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp539.397.500,00;
 - l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer sebesar Rp140.548.917,00;
 - m. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebesar Rp10.720.000,00;
 - n. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebesar Rp1.282.428.891,12;
 - o. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi sebesar Rp9.050.102,65;
 - p. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan sebesar Rp2.180.428.692,00;
 - q. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp536.000,00;
 - r. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp26.555.000,00;
- 8) Pendapatan BLUD dianggarkan Rp101.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp105.218.171.839,87 pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan langsung instalasi, pendapatan langsung non instalasi, pendapatan dari pemakaian kekayaan daerah, pendapatan pelayanan penjamin dan pendapatan lain-lain. Pendapatan BLUD terdiri dari Pendapatan BLUD RSUD – Anuntaloko terealisasi sebesar Rp87.071.055.623,00 dan pendapatan BLUD RSUD Tombolotutu terealisasi sebesar Rp18.147.116.216,87.

2. Pendapatan Transfer;

Pendapatan Transfer Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.597.587.938.783,90 dan terealisasi sebesar Rp1.490.975.965.552,26 atau 93,33 %, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.473.390.311.000,00	1.405.870.563.037,00	(67.519.747.963,00)	95,42

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.197.627.783,90	85.105.402.515,26	(39.092.225.268,64)	68,52
	Jumlah	1.597.587.938.783,90	1.490.975.965.552,26	(106.611.973.231,64)	93,33

*) Sebelum audit BPK

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri Dana Perimbangan dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp.1.473.390.311.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.405.870.563.037,00 atau 95,42 %

1) Dana Perimbangan**a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp69.003.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp67.579.702.390,00 atau 97,94% terbagi dari 11 jenis dana bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Dana Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.461.540.000,00	6.886.208.700,00	(575.331.300,00)	92,29
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	8.733.979.500,00	8.733.979.500,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.749.817.000,00	172.980.300,00	(9.576.836.700,00)	1,77
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	208.752.000,00	202.702.890,00	(6.049.110,00)	97,10
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	17.096.607.000,00	1.130.217.000,00	(15.966.390.000,00)	6,61
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	15.966.390.000,00	15.966.390.000,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
7	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landr//ent	0,00	3.206.944.000,00	3.206.944.000,00	0,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	30.125.606.000,00	26.918.662.000,00	(3.206.944.000,00)	89,35
9	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	216.419.000,00	216.419.000,00	0,00	100,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.631.327.000,00	2.631.327.000,00	0,00	100,00
11	DBH Sawit	1.513.872.000,00	1.513.872.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	69.003.940.000,00	67.579.702.390,00	(1.424.237.610,00)	97,94

*) Sebelum audit BPK

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.858.534.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.861.643.791.877,00 atau 100,36 %.

Realisasi Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
1	DAU	555.403.952.000,00	576.771.661.000,00	21.367.709.000,00	103,85
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	110.711.446.000,00	92.453.318.877,00	(18.258.127.123,00)	83,51
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	120.823.754.000,00	120.823.754.000,00	0,00	100,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	70.595.058.000,00	70.595.058.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	858.534.210.000,00	861.643.791.877,00	3.109.581.877,00	100,36

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp314.833.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp289.431.354.530,00 atau 91,93 %.

Realisasi Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	57.831.124.000,00	50.697.770.361,00	(7.133.353.639,00)	87,67
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	257.002.036.000,00	238.733.584.169,00	(18.268.451.831,00)	92,89
	Jumlah	314.833.160.000,00	289.431.354.530,00	(25.401.805.470,00)	91,93

*) Sebelum audit BPK

2) Dana Desa

Dana Desa yang diterima pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp231.019.001.000,00 terealisasi sebesar Rp187.215.714.240,00 atau 81,04%.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer antar Daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp124.197.627.783,90 dan terealisasi sebesar Rp85.105.402.515,26 atau hanya 68,52%. Pendapatan transfer antar daerah terbagi dari 7 jenis bagi hasil sebagai berikut :

Pendapatan Transfer antar Daerah merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.688.116.144,00	2.688.116.144,00	0,00	100,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.720.989.718,00	2.720.989.718,00	0,00	100,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79.484.871.365,10	42.885.974.740,83	(36.598.896.624,27)	53,95
4	Bagi Hasil dari Pajak Air permukaan	1.807.972.261,80	1.204.941.451,43	(603.030.810,37)	66,65
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	22.795.678.295,00	20.905.380.461,00	(1.890.297.834,00)	91,71
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	14.600.000.000,00	14.700.000.000,00	100.000.000,00	100,68
7	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
	Jumlah	124.197.627.783,90	85.105.402.515,26	(39.092.225.268,64)	68,52

*) Sebelum audit BPK

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Tahun 2025 dengan target sebesar Rp.44.809.536.531,00 dan terealisasi sebesar Rp17.237.411.700,00 atau 38,46%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	44.809.536.531,00	38.321.473.344,00	(6.488.063.187,00)	85,52

– **Hambatan, Kendala dan Upaya Pencapaian Target Pendapatan**

Pada Tahun 2025, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- b. Keterbatasan personil dalam pengelolaan dan penarikan pajak daerah; dan
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengatasi hambatan tersebut diatas antara lain:

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah;
- b. Optimalisasi personil melalui peningkatan keterampilan aparat pemungut pajak dan retribusi daerah; dan
- c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan penggunaan transaksi non tunai dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

4.2. Realisasi Belanja Menurut Jenis belanja;

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan. Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.849.937.764.184,94 dan dapat direalisasikan Rp1.706.050.737.600,62 atau mencapai 92,22% yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

– **Realisasi Belanja Daerah**

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih / Kurang	%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	1.375.024.799.602,94	1.298.739.727.733,60	76.285.071.869,34	94,45
BELANJA MODAL	138.618.954.938,00	118.668.206.345,77	19.950.748.592,23	85,61
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.450.000.000,00	5.693.575.463,25	1.756.424.536,75	76,42
BELANJA TRANSFER	328.844.009.644,00	282.949.228.058,00	45.894.781.586,00	86,04
Jumlah	1.849.937.764.184,94	1.706.050.737.600,62	143.887.026.584,32	92,22

*) Sebelum audit BPK

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.375.024.799.602,94 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.298.739.727.733,60 atau 94,45%, dengan rincian pada tabel berikut:

Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	819.264.528.100,41	770.555.649.314,00	48.708.878.786,41	94,05
Belanja Barang dan Jasa	488.065.733.264,54	461.146.885.430,66	26.918.847.833,88	94,48
Belanja Bunga	20.000.000,00	6.511.281,94	13.488.718,06	32,56
Belanja Hibah	65.245.684.637,99	64.614.321.232,00	631.363.405,99	99,03
Belanja Bantuan Sosial	2.428.853.600,00	2.416.360.475,00	12.493.125,00	99,49
Jumlah	1.375.024.799.602,94	1.298.739.727.733,60	76.285.071.869,34	94,45

*) Sebelum audit BPK

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp819.264.528.100,41 dan telah direalisasikan sebesar Rp770.555.649.314,00 atau 94,05% dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/Kurang	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	578.498.196.538,26	551.176.007.621,00	27.322.188.917,26	95,28
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	222.008.266.912,15	200.723.893.099,00	21.284.373.813,15	90,41

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/Kurang	%
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.604.798.650,00	17.590.485.648,00	14.313.002,00	99,92
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	198.566.000,00	110.902.946,00	87.663.054,00	55,85
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH	601.900.000,00	601.560.000,00	340.000,00	99,94
Belanja Pegawai BLUD	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00	100,00
Jumlah	819.264.528.100,41	770.555.649.314,00	48.708.878.786,41	94,05

*) Sebelum audit BPK

Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2025 khususnya pada Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp198.566.000,00 dan terealisasi sebesar Rp110.902.946,00 atau 55,85%. Disebabkan gaji pokok Pj. Bupati Parigi Moutong tidak dapat dicairkan karena sudah menerima gaji pokok sebagai ASN di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga hanya mendapat tunjangan jabatan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp488.065.733.264,54 dan telah direalisasikan sebesar Rp461.146.885.430,66 atau 94,48%. Belanja ini digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/Kurang	%
Belanja Bahan Pakai Habis	63.526.261.328,00	61.270.794.892,95	2.255.466.435,05	96,45
Belanja Aset Tetap yang Tidak	314.215.305,00	313.013.655,00	1.201.650,00	99,62

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/Kurang	%
Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				
Belanja Jasa Kantor	124.531.527.083,04	115.834.484.751,00	8.697.042.332,04	93,02
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.485.835.613,00	22.118.230.067,00	2.367.605.546,00	90,33
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.660.628.384,00	15.002.435.555,00	658.192.829,00	95,80
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	500.700.000,00	345.261.000,00	155.439.000,00	68,96
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	3.795.996.650,00	3.696.593.370,00	99.403.280,00	97,38
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.333.799.051,00	3.166.486.460,00	167.312.591,00	94,98
Belanja Pemeliharaan Tanah	120.000.000,00	119.609.902,00	390.098,00	99,67
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.529.492.578,00	5.213.209.390,00	316.283.188,00	94,28
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.550.803.811,00	9.089.469.518,66	461.334.292,34	95,17
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.189.765.013,00	2.177.748.410,00	12.016.603,00	99,45
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.314.185.371,50	49.166.182.550,00	5.148.002.821,50	90,52
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.823.733.640,00	2.504.341.497,00	1.319.392.143,00	65,49
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.332.591.340,00	4.291.141.095,00	41.450.245,00	99,04
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	47.206.050.891,00	43.133.646.129,00	4.072.404.762,00	91,37
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	1.150.548.650,00	1.015.595.050,00	134.953.600,00	88,27
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	335.200.000,00	94.750.000,00	240.450.000,00	28,27
Belanja Barang dan Jasa BOK	24.903.706.794,00	23.763.144.487,00	1.140.562.307,00	95,42

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/Kurang	%
Puskesmas				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	98.362.691.762,00	98.732.747.651,05	(370.055.889,05)	100,38
Jumlah	488.065.733.264,54	461.146.885.430,66	26.918.847.833,88	94,48

*) Sebelum audit BPK

3) Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Belanja Bunga TA. 2025 yang dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.511.281,94 atau sebesar 32,56%, jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp91.004.047,01 mengalami penurunan sebesar Rp84.492.765,07 atau 92,85%. Rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bunga di TA 2025 yaitu perhitungan nilai bunga yang berasal dari pemerintah pusat karena nilai pokok pinjaman yang menurun, sehingga pemerintah daerah hanya membayarkan sesuai tagihan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Belanja Bunga tersebut di atas merupakan pembayaran atas bunga Pinjaman Luar Negeri *Loan* IBRD SLA dengan surat perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-91/MK.5/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Penandatanganan Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang mengatur atas pinjaman sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan masa pinjaman 15 Tahun dan dikenakan bunga pinjaman sebesar tingkat bunga Pinjaman Luar Negeri ditambah 5,02% (lima koma nol dua persen). Jatuh tempo atas perubahan tersebut berlaku pada tanggal 15 April 2025. Rincian pembayaran bunga tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai Surat Tagihan dari Kemetrian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov Sulteng kepada Pemda Kabupaten Parigi Moutong No. S-1354/WPB.27/2025 tanggal 11 September 2025 untuk pembayaran bunga jatuh tempo 15 Oktober 2025 yaitu bunga sebesar Rp4.887.080,03 dengan Nomor

SP2D 72.08/04.0/001814/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P3/10/2025 tanggal lunas 02 Oktober 2025, dan;

- b. Sesuai Surat Tagihan dari Kemetrian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov Sulteng kepada Pemda Kabupaten Parigi Moutong No. S-270/KPN.1210/2025 tanggal 21 November 2025 untuk pembayaran tagihan kekurangan pembayaran bunga atas kewajiban pemkab Parigi Moutong Pinjaman LOAN No. SLA-1203/DP3/2006 sebesar Rp1.624.201,91 dengan Nomor SP2D 72.08/04.0/002611/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 dengan tanggal lunas 25 November 2025.

4) Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Belanja Hibah TA 2025 yang dianggarkan sebesar Rp65.245.684.637,99 dan terealisasi sebesar Rp64.614.321.232,00 atau 99,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp140.127.232.313,00 mengalami penurunan sebesar Rp75.512.911.081,00 atau 53,89%. Rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/Kurang	%
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.656.222.073,00	14.656.222.000,00	73,00	100,00
- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	14.656.222.073,00	14.656.222.000,00	73,00	100,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	850.933.150,00	850.620.000,00	313.150,00	99,96
- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	850.933.150,00	850.620.000,00	313.150,00	99,96
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.467.453.414,99	28.709.446.522,00	758.006.892,99	97,43
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-	4.191.845.510,99	4.064.495.655,00	127.349.855,99	96,96

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/Kurang	%
Undangan				
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.523.246.904,00	9.502.836.968,00	20.409.936,00	99,79
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.502.361.000,00	14.942.113.899,00	560.247.101,00	96,39
- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	80,00
Belanja Hibah Dana BOS	4.810.992.000,00	4.791.447.500,00	19.544.500,00	99,59
- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.810.992.000,00	4.791.447.500,00	19.544.500,00	99,59
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP	15.460.084.000,00	15.606.585.210,00	(146.501.210,00)	100,95
- Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	10.338.564.000,00	10.261.203.210,00	77.360.790,00	99,25
- Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.121.520.000,00	5.345.382.000,00	(223.862.000,00)	104,37
Jumlah	65.245.684.637,99	64.614.321.232,00	631.363.405,99	99,03

*) Sebelum audit BPK

Rendahnya capaian realisasi Belanja Hibah di TA 2025 khususnya Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan disebabkan terdapat belanja yang tidak terealisasi, yaitu:

- Belanja Hibah Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Kelompok Tani Sulempa Jaya yang dianggarkan sebesar Rp88.000.000,00 tidak terealisasi karena pihak penyedia tidak bersedia melaksanakan pekerjaan atau mengundurkan diri.

- b. Belanja Hibah Hand Traktor sebanyak 7 Unit yang dianggarkan sebesar Rp283.500.000,00 tidak dapat terealisasi disebabkan tidak tersediannya stok barang di toko diakibatkan sudah di terbeli oleh kementerian Pertanian Pusat.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.428.853.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.416.360.475,00 atau 99,49% dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/Kurang	%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	60.491.100,00	55.450.175,00	5.040.925,00	91,67
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	783.128.250,00	780.695.800,00	2.432.450,00	99,69
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.585.234.250,00	1.580.214.500,00	5.019.750,00	99,68
Jumlah	2.428.853.600,00	2.416.360.475,00	12.493.125,00	99,49

*) Sebelum audit BPK

b. Belanja Modal

– Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp138.618.954.938,00 dan terealisasi sebesar Rp118.668.206.345,77 atau 85,61%. Dapat dilihat pada rincian berikut:

Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih / (Kurang)	%
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.735.025.950,00	38.959.368.166,00	3.775.657.784,00	91,16
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.787.800.017,00	45.833.877.376,00	8.953.922.641,00	83,66
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.652.314.837,00	20.106.762.760,77	7.545.552.076,23	72,71
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.855.148.700,00	11.113.139.832,00	(3.257.991.132,00)	141,48
Belanja Modal Aset Lainnya	5.430.865.434,00	2.497.258.211,00	2.933.607.223,00	45,98
Jumlah	138.618.954.938,00	118.668.206.345,77	19.950.748.592,23	85,61

*) Sebelum audit BPK

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 7.450.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 5.693.575.463,25 atau 76,42 %. Rendahnya realisasi Belanja Tak Terduga pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan kurangnya terjadi bencana alam yang terjadi, rincian Belanja Tak Terduga terdiri dari:

1. Belanja Tak Terduga yang dikeluarkan dalam rangka penanggulangan bencana sebesar Rp3.235.736.665,25. Belanja tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong
2. Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.317.860.000,00 yang dikeluarkan untuk Bantuan Kejadian Luar Biasa Malaria di Kabupaten Parigi Moutong belanja tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 300.2.2/809/BPBD tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria Tahun 2025;
3. Belanja Tak Terduga sebesar Rp751.000,00 yang dikeluarkan akibat pengembalian dana atas kesalahan transfer setoran pengembalian kelebihan pembayaran yang seharusnya ke rekening Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetapi di transfer ke RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

4. Belanja Tak Terduga Rp30.000.000,00 atas pengembalian kelebihan pembayaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar akibat kesalahan penyetoran, yang seharusnya ke Kas Sekolah tetapi disetor ke RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
5. Belanja Tak Terduga sebesar Rp39.391.598,00 atas kesalahan transfer dari RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong ke rekening Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0327230966 An. BLUD RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong;
6. Belanja Tak Terduga sebesar Rp500.000.000,00 untuk kepentingan penyidikan dalam rangka pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Jalan Gio – Tuladenggi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023;
7. Belanja Tak Terduga sebesar Rp569.836.200,00 untuk keperluan Kegiatan Penyaluran Pangan di Kabupaten Parigi Moutong.

d. Belanja Transfer

– Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp328.844.009.644,00 dan terealisasi sebesar Rp282.949.228.058,00 atau 86,04%.

e. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp6.502.077.344,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.411.116.732,00 atau 98,60 % diuraikan sebagai berikut:

– Realisasi Belanja Bagi Hasil

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih / (Kurang)	%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.258.034.631,40	5.251.062.494,00	6.972.137,40	99,87
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.244.042.712,60	1.160.054.238,00	83.988.474,60	93,25
Jumlah	6.502.077.344,00	6.411.116.732,00	90.960.612,00	98,60

*) Sebelum audit BPK

1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.251.062.494,00 disalurkan kepada 278 Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; dan
2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.160.054.238,00 disalurkan kepada 278 Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan keuangan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp322.341.932.300,00 dan direalisasikan sebesar Rp276.538.111.326,00 atau 85,79 %

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Realisasi Pembiayaan Daerah

(dalam rupiah)

Pembiayaan Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/Kurang	%
Penerimaan Pembiayaan	28.921.327.916,04	28.921.327.916,04	0,00	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.250.000.000,00	1.227.562.334,00	22.437.666	98,20
Jumlah	27.671.327.916,04	27.693.765.582,04	22.437.666	100,08

*) Sebelum audit BPK

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp28.921.327.916,04 dan terealisasi sebesar Rp28.921.327.916,04 atau 100,00%. Rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/kurang	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.921.327.916,04	28.921.327.916,04	0,00	100,00
Jumlah	28.921.327.916,04	28.921.327.916,04	0,00	100,00

*) Sebelum audit BPK

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Besarnya pengeluaran daerah dalam pembiayaan pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.250.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp227.562.334,00 atau 91,02%. Adapun rincian anggaran dan realisasi pengeluaran daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/kurang	%
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	250.000.000,00	227.562.334,00	22.437.666	91,02
Jumlah	1.250.000.000,00	1.227.562.334,00	22.437.666,00	98,20

*) Sebelum audit BPK

3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SiLPA Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 sebelum audit BPK dengan perhitungan dari Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Realisasi Laporan Realisasi Anggaran

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025		Lebih/kurang	%
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	179.868.960.954,00	190.798.662.228,23	10.929.701.274,23	106,08
Pendapatan Transfer	1.597.587.938.783,90	1.490.975.965.552,26	(106.611.973.231,64)	93,33
Lain-lain Pendapatan yang sah	44.809.536.531,00	38.321.473.344,00	(6.488.063.187,00)	85,52
Jumlah Pendapatan	1.822.266.436.268,90	1.720.096.101.124,49	(102.170.335.144,41)	94,39
Belanja Operasi	1.375.024.799.602,94	1.298.739.727.733,60	76.285.071.869,34	94,45
Belanja Modal	138.618.954.938,00	118.668.206.345,77	19.950.748.592,23	85,61
Belanja Tidak Terduga	7.450.000.000,00	5.693.575.463,25	1.756.424.536,75	76,42

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025		Lebih/kurang	%
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Transfer	328.844.009.644,00	282.949.228.058,00	45.894.781.586,00	86,04
Jumlah Belanja	1.849.937.764.184,94	1.706.050.737.600,62	143.887.026.584,32	92,22
Surplus/Defisit	-27.671.327.916,04	14.045.363.523,87	41.716.691.439,91	(50,76)
Penerimaan Pembiayaan	28.921.327.916,04	28.921.327.916,04	0,00	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.250.000.000,00	1.227.562.334,00	22.437.666,00	98,20
Jumlah Pembiayaan Netto	27.671.327.916,04	27.693.765.582,04	22.437.666,00	100,08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	41.739.129.105,91	41.739.129.105,91	

*) Sebelum audit BPK

Rincian Silpa Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

SILPA TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025
Kas di Kas Daerah	32.778.327.475,66
Kas di bendahara Penerimaan SKPD	741.400,20
Kas di bendahara Pengeluaran SKPD	0,00
Kas di Rek BLUD RSUD Anuntaloko	4.340.385.336,84
Kas di Rek BLUD RSUD Raja Tombolotutu	2.639.197.873,21
Kas di Rek Dana Kapitasi JKN FKTP	123.974.110,00
Kas Lainnya	0,00
Kas Dana BOSP	769.560.399,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.086.942.511,00
Jumlah	41.739.129.105,91

*) Sebelum audit BPK

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 yang berasal/bersumber dari DAU dapat digunakan untuk belanja daerah, namun demikian proses penganggarannya tetap harus memperhatikan dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku, sedangkan yang berasal/bersumber dari dana selain DAU harus didasarkan pada petunjuk teknisnya maupun ketentuan lain yang dipersamakan

5. Inovasi Daerah

PRODUK INOVASI DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2025

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program Dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pelayanan Publik	Non Digital	Lomba Kreasi Inovasi Masyarakat & Lomba Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Antar Asn, Opd Dan P3k	Implementasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pelayanan Publik	Digital	Simetri (Sistem Informasi Manajemen Terpadu Riset Dan Inovasi)	Uji Coba	Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Inovasi Teknologi
3.	Dinas Perikanan Dan Kelautan	Pelayanan Publik	Non Digital	Bidang Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Implementasi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/ Kota
4.	Dinas Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah	Pelayanan Publik	Non Digital	Molomamua	Implementasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umk) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Di Lakukan Melalui Pendataan, Kemitraan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Pemangku kepentingan
5.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik	Digital	Jempol Duren (Jempu Bola Penduduk Rentan)	Implementasi	Program Pendaftaran Penduduk kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen An Rentan Administrasi kependudukan
6.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Implementasi	Program Pengelolaan Dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kab/Kota

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program Dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.		Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Dalam Rangka Konektifitas Antar Kawasan Baik Kawasan Wisata, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Dan Kawasan Permukiman Wilayah Kabupaten Parigi Moutong	Implementasi	Program Penyelenggara N Jalankegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota
8.	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Pengelolaan Persampahan, Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/Tspt/Spa Kab/Kota	Implementasi	Program Pengolahan Persampahan
9	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Publik	Non Digital	Bapak Desa (Bayar Pajak Dengan Sampah)	Inisiatif	Kegiatan Pengolahan Sampah sub Kegiatan Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Ditpa/Tpst/Spa Kabupaten/Kota
10.	Dinas Kesehatan Dan Perternakan Kesehatan Hewan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri	Implementasi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Saran Pertaniankegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabu/Kota
11.		Inovasi Pelayanan Publik	NON DIGITAL	PELAYANAN TERPADU " SAUNG TANI" (PUSAT BELAJAR TEKNOLOGI PERTERNAKAN)	IMPLEMENTASI	Program Penyuluhan sub Kegiatan Pembentukan Dan Penyelenggara N Seklah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kab/Kota
12.	Dinas Pendidikan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Siprodik (Sistem Aplikasi Profil Pendidikan)	Implementasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotakegiatanpeencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerjaperangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program Dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Sibimo (Sistem Informasi Bencana Kabupaten Parigi Moutong)	Implementasi	Program Penanggulangan N Bencanakegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencanakab/Kota
14.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Si Takur (Sistem Informasi Takarukut Timbangan)	Implementasi	Program Standarisasi Dan Perlindungan Komsumenkegiatan Pelaksanaan Tera Tera Ulangan Pengawasan
15.	Badan Pendapatan Daerah	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Sistem Pengelolaan Pajak Daerah Terintegrasi Dengan Aplikasi Smartgov Dan Citigov	Implementasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerahkegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerahsub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahdaerah
16.	Dinas Informasi Dan Komunikasi	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Sipadi (Sistem Pelayanan Publik Secara Online Di Kabupaten Parigimoutong	Implementasi	Program Pengelolaan Aplikasi Infomatikakegiatan Pengelolaan E- Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kotatub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraa N Spbe Di Lingkungan Pemda
17.	Dinas Pemberdayaan Pere Mpuan, Perlindungan Ana K Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb)	Pelayanan Publik	Non Digital	Keranjang Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting Melalui Keranjang Dashat)	Implementasi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)Egiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber- Kbsub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan
18.	Desa Kotaraya Selatan	Pelayanan Publik	Digital	Simdes ' Sistem Informasi, Manajemen Danadministrasi Desa	Implementasi	Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Di Kampung Keluarga Berkualitas
19.	Desa Taopa	Pelayanan Publik	Digital	(Sidedi) Opensid Taopa'Sisteminformasi Desadigital'	Implementasi	